**IMPLEMENTASI WEBSITE DESA DALAM**

**PEMBERIAN PELAYANAN INFORMASI PEMBANGUNAN**

(Studi pada Desa Hanura Kecamatan Teluk Pondan Kabupaten Pesawaran)

Muhammad Fikri Akbar1), Fery Hendi Jaya2), Erwin Putubasai3)

1Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Email: fikri.m.akbar@gmai.com

2Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Email: [feryhendi\_jaya@yahoo.co.id](mailto:feryhendi_jaya@yahoo.co.id)

3Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Email: [erwinputubasai@gmail.com](mailto:erwinputubasai@gmail.com)

***Abstrak***

*Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk perubahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Berdasarkan hal tersebut website desa sebagai media Pelayanan informasi pembangunan, yang merupakan salah satu jenis layanan dari sistem e-Government. Hal tersebut menjadi penting, karena semakin seriusnya pihak pemerintah dalam mengembangkan sistem e-Government di Indonesia, semakin tingginya persentasi pengguna internet di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi website desa dalam upaya pemberian pelayanan informasi pembangunan pada masyarakat desa. Electronic Governmnet merupakan suatu proses sistempemerintahan dengan memanfaatkan Information Communication AndTechnology (ICT) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasidan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya, sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya (Hartono & Mulyanto, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Bogdan dan Taylor, 1992). Website hanura.desa.id cukup efektif sebagai media penyebaran informasi pembangunan desa, baik efek dalam kajian komunikasi massa (kognitif, afektif, dan konatif) maupun komunikasi interpersonal (keterbukaan, empati, dan sikap mendukung).*

***Keywords****:* *e-Government, website desa, informasi, pembangunan*

***Abstract***

*Communication Information Technology for life change and economic growth in rural areas. Based on this the village website as a medium for development information services, which is one type of service from the e-Government system. This becomes important, because the more serious the government is in developing e-Government systems in Indonesia, the higher the percentage of internet users in Indonesia. This study aims to see the implementation of village websites in efforts to provide development information services to rural communities. Electronic Governance is a governance process by utilizing Information Communication and Technology as a tool to facilitate communication processes and transactions for citizens, business organizations and between government agencies and their staff, so that efficiency, effectiveness, transparency and accountability of the government can be achieved for the community (Hartono & Mulyanto, 2010). This study uses a qualitative approach that is expected to be able to produce an in-depth description of speech, writing, and behavior that can be observed from an individual, group, society, and certain organizations in the context of certain settings which are studied from a holistic, comprehensive, and holistic perspective (Bogdan and Taylor, 1992). The hanura.desa.id website is quite effective as a medium for disseminating information on village development, both effects in the study of mass communication (cognitive, affective, and conative) and interpersonal communication (openness, empathy, and supportive attitude).*

*Keywords: e-Government, village website, information, development*

**PENDAHULUAN**

Sebagai negara kepulauan, menyediakan informasi yang merata kepada masyarakat menjadi suatu tantangan bagi pemerintah Indonesia. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis internet merupakan salah satu solusi dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai isu-isu pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2015), upaya pemerataan akses internet sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan menargetkan minimal 30% masyarakat perkotaan di Indonesia dapat menikmati internet *broadband* pada tahun 2019. Upaya lain ditujukan pada peningkatan pengetahuan bahwa pembangunan infrastruktur internet tidak hanya menyangkut hak atas akses informasi, tetapi juga berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan pemberdayaan komunitas tertinggal.

Pemanfaatan TIK oleh pemerintah serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan disebut dengan e-Government. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Istilah *e-Government* di Indonesia pertama kali diperkenalkan dalam pelayanan publikmelalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Informasi dan Teknologi Komunikasi. Keputusan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tata pemerintahan yang baik. Sistem *e-Government* yang dimaksudkan untuk mengatasi Pelayanan informasi ke wilayah Indonesia yang luas, namun justru kurang mendapat perhatian dari masyarakat di pedesaan misalnya, karena minimnya sarana, keterampilan, dan pengetahuan untuk menggunakan sistem *e-Government.*

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memiliki pertimbangan utama bahwa desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Desa merupakan ujung tombak pemerintahan terbawah yang menyimpan potensi untuk memberikan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat setempat.Desa merupakan suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Inti utama dari Undang-Undang Desa adalah pemberdayaan, di mana pemerintah desa bersama masyarakatnya mampu mengembangkan potensi desanya sehinggga dapat meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri, serta untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Salah satu implikasi dari penerapan Undang-undang Desa no 6 tahun 2014 adalah adanya alokasi anggaran dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk pembangunan berbagai sektor kehidupan di desa sesuai dengan kondisi geografis, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Untuk beberapa desa, dana tersebut nantinya akan dialokasikan peningkatan kualitas sistem informasi dan manajemen informasi data dalam rangka tertib administrasi, publikasi potensi desa, serta memberikan informasi seputar desa kepada masyarakatnya.

*Website* desa merupakan salah satu bagian dari sebuah sistem informasi desa, yang berfungsi sebagai media informasi, sarana publikasi dan media interaksi antara aparat desa dengan masyarakat luas. *Website* adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untukmenampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendukung efektivitas *website* pemerintahan adalah semakin berkembangnya teknologi informasisehingga masyarakat semakin mudah mengakses internet, serta tingkat pendidikan yang lebih baik, sedangkan faktor penghambat efektivitas *website* adalah belum ada interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Rekomendasi yang diberikan dari penelitian tersebut salah satunya adalah sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah daerah mengenai penggunaan *website*, agar masyarakat semakin mengenal dan mempergunakan *website* semaksimal mungkin.

Kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kegiatan komunikasi pembangunan di masa mendatang, selain iklim ekonomi dan politik, sistem pengetahuan, serta konteks sosial di wilayah pedesaan, sehingga di masa depan masyarakat pedesaan relatif berpendidikan, lebih banyak memperoleh informasi dari media massa serta terbuka dari isolasi geografis, lebih memiliki aksesibilitas dengan kehidupan bangsanya sendiri dan dunia internasional. Dengan demikian, kegiatan komunikasi pembangunan akan lebih bersifat interaktif dan partisipatif. Keinginan mewujudkan masyarakat modern yang tidak tertinggal globalisasi, mendorong pemerintah untuk berupaya memberikan akses murah terhadap internet, juga mengenalkan penggunaan TIK untuk perubahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan.

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki cukup banyak pengguna internet di Indonesia, Provinsi Lampung tentu memiliki keunikan demografis terkait penggunaan internet oleh masyarakatnya. Kabupaten Pesawaran sebagai bagian dari wilayah Lampung memanfaatkan potensi tersebut untuk mengembangkan sistem *e-Government* di lingkungan Kabupaten Pesawaran. Sejauh ini menurut Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesawaran, sistem *e-Government* berbasis *website* di Kabupaten Pesawaran telah memasuki tahap pembuatan *website* kecamatan, sedangkan untuk pembuatan *website* desa belum direncanakan.

Domain *desa.id* merupakan usulan domain tingkat dua (DTD) yang muncul dari gagasan para kepala desa yang tergabung dalam Gerakan Desa Membangun (GDM) bekerjasama dengan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), gagasan domain *desa.id* sebenarnya berawal dari ketidakjelasan domain apa yang tepat digunakan oleh desa yang telah memiliki *website*. Setelah melakukan advokasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pada 6 Februari 2015 diterbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 5 tahun 2015 tentang Registrasi Domain Instansi Penyelenggara Negara, yang mengatur pengelolaan nama domain dengan kode *go.id*, *.id*, serta *desa.id* yang dimiliki oleh instansi penyelenggara negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut mengenai implemntasi *website* desa sebagai media pelayanan informasi pembangunan, yang merupakan salah satu jenis layanan dari sistem *e-Government*. Hal tersebut menjadi penting, karena semakin seriusnya pihak pemerintah dalam mengembangkan sistem *e-Government* di Indonesia dan semakin tingginya persentasi pengguna internet di Indonesia.

**TINJAUAN PUSTAKA**

***Website***

*Website* dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan link-link (Nugroho, 2009). *Website* dapat dijadikan media oleh pemerintah daerah dalam menjalankantujuan *e-Government*. *e-Government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet. Peran Pemerintah terhadap *website*nya adalah sebagai pengelola, pengatur, pengontrol dan pengawas yang memberikan berita terbaru, baik itu informasi secara umum maupun informasi mengenai pemerintah, misalnya informasi adanya program-program maupun *event-event* yang sedang akan dan sedang berlangsung, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi di manapun, kapanpun (Aprilia, 2014).

***Elektronik Goverment***

*Electronic Governmnet* merupakan suatu proses system pemerintahan dengan memanfaatkan *Information Communication And Technology* (ICT) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasidan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya, sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya (Hartono & Mulyanto 2010). Dengan konsep pengembangan menyangkut hubungan*Government to Government* (G2G)*, Government to Business* (G2B) dan *Government to Citizen* (G2C)*.*

Secara konseptual, konsep dasar dari *e-Government* sebenarnya adalah bagaimana memberikan pelayanan melaluielektronik (*e-service*), seperti melalui internet, jaringan telepon seluler dan komputer, serta multimedia, melalui pengembangan *e-Government* ini, dilakukan pula penataan sistem manajemen informasi dan proses pelayanan publik dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Jadi dari persektif komunikasi, *e-Government* merupakan pemanfaatan media komunikasi berbasis internet oleh pemerintah untuk menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakat yang lebih luas dan mendapatkan umpan balik lebih cepat. Sistem *e-Government* di Indonesia berawal dari keinginan pemerintahan untuk mengimplementasikan *e-Government* yang telah dituangkan dalam Inpres RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kepmen) Nomor 57/Kep/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government*.

**Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Pemanfaatan TIK oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan disebut dengan *e-Government* (Sosiawan, 2015). Istilah *e-Government* di Indonesia pertama kali diperkenalkan dalam pelayanan publik melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Informasi dan Teknologi Komunikasi. Keputusan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tata pemerintahan yang baik. Sistem *e-Government* yang dimaksudkan untuk mengatasi Pelayanan informasi ke wilayah Indonesia yang luas, namun justru kurang mendapat perhatian dari masyarakat di pedesaan misalnya, karena minimnya sarana, keterampilan, dan pengetahuan untuk menggunakan sistem *e-Government.*

Pembangunan bukanlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk masyarakatnya, melainkan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah bersama dengan seluruh masyarakatnya. Esensi kegiatan pembangunan adalah terjadinya perubahan sikap untuk memproyeksikan diri ke dalam situasi lain dan karena itu secara sadar dan terencana menyiapkan diri untuk melakukan perubahan untuk memperbaiki mutu hidupnya guna mengantisipasi keadaan dan perubahan yang akan terjadi dimasa mendatang. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan, pelaksanan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Konsep komunikasi pembangunan khas Indonesia dapat didefinisikan sebagai proses Pelayanan pesan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah, yang dalam keselarasannya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat.

**Pembangunan Desa**

Definisi mengenai desa sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli, terdapat beberapa sudut pandang dalam melihat pengertian desa yaitu aspek geografis, ekonomi, sosial psikologis, dan statistik. Penulis mengambil pengertian desa dari sisi pemerintahan, karena berkaitan dengan sistem *e-Government*, dalam Peraturan Pemerintah RI (PP) No. 76/2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dinyatakan bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaiman dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Belajar dari kasus di Korea Selatan dengan gerakan *Saemul Undong*, yaitu gerakan yang difokuskan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur (jalan, air minum, listrik, dan sarana komunikasi) di pedesaan serta penghijauan, maka diperlukan penumbuhan momentum baru yang dapat menstimulir upaya peningkatan masyarakat pedesaan secara sistematis dan terencana. Pembangunan pedesaan yang baik akan memberikan peluang bagi setiap individu yang ada di dalamnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sejalan dengan peluang yang tercipta atau diciptakan pemerintah dan pihak lain. Maka, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 merupakan momentum yang baik untuk peningkatan pembangunan desa, salah satunya dengan pembuatan *website* desa yang berkualitas sebagai media promosi potensi desa dan Pelayanan informasi pembangunan desa, sistem informasi dan komunikasi menjadi penting karena arus globalisasi mengharuskan desa dapat mengejar ketertinggalan selama ini. (Husna dan Abdullah, 2016).

**METODE PENELITIAN**

Dalam suatu penelitian, metode yang digunakan akan menentukan bagaimana peneliti melaksanakan penelitiannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Bogdan dan Taylor, 1992). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum mengenai kenyataan-kanyataan tersebut.

Paradigma akan memberikan arahan bagi peneliti dalam menentukan pendekatan atau perspektif dalam penelitian. Pengertian perspektif sebagai seperangkat gagasan yang melukiskan karakter situasi yang memungkinkan pengambilan tindakan atau merupakan standar nilai dari obyek dan orang yang dinilai (Kriyantono, 2008). Dengan menggunakan perspektif seseorang dapat menentukan metodologi penelitian yang akan dipergunakan. Ini memperjelas arah dilakukannya penelitian tersebut. Hubungan antara perspektif dengan metodologi dan metode riset sangat erat. Dalam penelitian ini, digunakan perspektif konstruktivis, sedang metodologi riset yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode riset yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah etnografi, dengan menganalisis data-data penelitian secara eksploratif.

Populasi dalam penelitian adalah masyarakat desa hanura yang aktif mengakses *website hanura.desa.id*. Untuk mempermudah proses pengumpulan data, maka peneliti menggunakan data dari media sosial *Facebook* dan kolom komentar pada *website hanura.desa.id*. Kelompok pertama adalah anggota akun Pewarta Desa Hanura yang aktif memberikan *Like*, *Comment*, dan atau *Share* pada setiap status/*postingan* akun *Pewarta Desa Hanura* periode Mei 2017–Maret 2019. Sampel dari penelitian ini adalah sembilan responden.Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel purposif atau bertujuan (*purposive sampling*) yaitu pemilihan siapa subyek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga menentukan subyek terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu (Silalahi, 2010).

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan di penelitian ini dengan menggunakan kuesioner, wawancara langsung, observasi langsung, studi literatur. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1994) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2007).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengakses *website hanura.desa.id* mayoritas adalah masyarakat luar desa dengan tujuan untuk pencarian informasi dan interaksi. Latar belakang pengakses *website* masih terbatas pada pihak-pihak yang yang memiliki ketertarikan terhadap perkembangan *website* desa di Indonesia, seperti LSM Gerakan Desa Membangun dan aparat dari desa lain. Tampilan *website hanura.desa.id* telah sesuai untuk jenis *website* pemerintahan pada tahap awal perkembangan, dan sesuai dengan kondisi jaringan internet yang lemah. Jenis informasi dalam *website* telah meliputi informasi kegiatan pembangunan desa dan potensi desa, namun masih kurang untuk informasi profil dan statistik desa. Interaksi dengan pengakses *website* cukup efektif melalui kolom komentar pada *website*. Peran *internet opinion leader* lebih banyak dilakukan melalui media sosial *Facebook*, yaitu menyebarkan (*sharing*) tautan (*link*) informasi pembangunan dari *website*, dan membangun interaksi yang lebih personal dengan pengakses *website* melalui *chatting*.

Dari pernyataan pihak masyarakat tentang Pelayanan Informasi Pembangunan Desa Hanura dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian website pada Pelayanan Informasi Pembangunan Desa Hanura sudah beropersi sangat bagus yang dilengkapi fitur-fitur sesuai kebutuhan masyarakat, dalam jumlah pengguna semakin meningkat masyarakat yang menggunakan dan mengakses Website Desa Hanurasebagai Pelayanan Informasi Pembangunan Desa Hanura. Namun masih ada kekurangannya yaitu belum semua informasi tentanp pembangunan tertera dalamwebsite Desa Hanura.

Proses implementasi sistem layanan masyarakat pada Pelayanan Informasi Pembangunan Desa Hanura tidak lepas dari masalah dan kendala teknis. Implementasi sistem layanan masyarakat yang melibatkan pihak pegawai dan jajaran aparatur Desa Hanura khususnya Pelayanan Informasi Pembangunan Desa Hanura menuntut adanya kerjasama tim, penyatuan pandangan mekanisme kerja dan integritas serta profesionalisme kerja dari seluruh elemen pegawai dan manajemen tersebut. Apabila salah satu saja dari aspek tersebut belum mampu dicapai oleh elemen tim pelaksana sistem layanan masyarakat tersebut maka masalah dan kendala teknis akan muncul saat pelaksanaan sistem layanan masyarakat tersebut.

Implementasi website Desa Hanura memberikan terobosan dalam layanan informasi pembangunan Desa yang lebih cepat, mudah, dan aman sehingga seluruh elemen masyarakat dapat menikmati akses terhadap layanan tersebut. Berikut ini akan dibahas secara detail mengenai kajian terhadap kekuatan *(Strengths)*, kelemahan *(Weaknesses)*, peluang *(Opportunities)* dan ancaman *(Threats).*

Website Desa Hanura ikut andil dalam peningkatan Pelayanan Informasi Pembangunan Desa. Peningkatan ini disebabkan setelah website tersebut telah memberikan informasi seputar pembangunan Desa Hanura. Jumlah masyarakat yang mengakses website tersebut mengalami Peningkatan setiap tahun karena informasi yang disajikan cukup beragam dan *update.* Peningkatan SDM aparatur Desa Hanura terus bertambah setap tahunnya dan pelatihan bagi pegawai tentang website semakin komprehansif. Keuntungan website tersebut bagi masyarakat tentunya cukup banyak yaitu masyarakat dapat mengakses layanan Desa Hanura secara cepat. Selain itu masyarakat juga dapat mengikuti perkembangan kemajuan desa secara baik. Bagi aparatur Desa Hanura tentunya juga ada banyak sekali keuntungan yaitu dapat melayani masyarakat Desa Hanura lebih prima, biaya opersional lebih efisien dan mendukung pelayanan disektor pembangunan. Memiliki Banyak Sumber daya Insani yang terdidik. Mengintegrasikan kegiatan Desa Hanura dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Serta memahami apa yang dibutuhkan masyarakatnya. Kerjasama dengan lembaga atau institusi terkait. Desa Hanura dapat memanfaatkan website sebagai media Pelayanan Informasi Pembangunan untuk menjangkau masyarakat dan kawasan yang tak terakses secara fisik.

Implementasi Website untuk Pelayanan Informasi Pembangunan Desa Hanura memiliki Infrastruktur teknologi komunikasi yang belum merata antara masyarakat perkotaan dan masyarakat daerah. Sebagian daerah memang belum merata sehingga satu wilayah terkadang hanya memliki satu jaringan. Dan jika satu koneksi itu terganggu, pelayanan kepada masyarakat jadi terganggu. Tambahan biaya pembangunan infrastruktur teknologi website memakan biaya mahal, karena menggunakan teknologi maka di butuhkan dana yang lebih. Pemahaman masyarakat akan teknologi jaringan internet masih rendah, khususnya masyarakat di Desa Hanura, daerah ini rata-rata masih dikategorikan masyarakat daerah dan ekonomi menengah kebawah.

Implementasi Website pada Pelayanan Informasi Pembangunan Desa Hanura mendapat Dukungan dari pemerintah daerah sangat baik. Adanya kerjasama antara pihak pemerintahan daerah dengan Desa Hanura dan kedepannya akan ada sistem yang lebih komprehensif yang berbasis internet. Kepercayaan masyarakat terhadap website Desa Hanura meningkat, karena dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Digitalisasi pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, murah, dan mudah ke masyarakat. Misalnya, dengan membuka rekening digital melalui telepon pintar. Dengan biaya yang murah dan daya ekspansi yang cepat, Teknologi Pelayanan Informasi Pembangunan bisa secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Website sebetulnya memberikan peluang kepada masyarakat Desa Hanura untuk berkolaborasi. Jika selama ini masyarakat Desa Hanura kesulitan mencari informasi seputar pembangunan desa. Adanya regulasi tentang media sosial online, sehingga menumbuhkan rasa simpatik masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi di website Desa Hanura.

Implementasi website pada pelayanan informasi pembangunan Desa Hanura. Banyak media online sudah terlebih dahulu menerapkan teknologi pelayanan informasi pembangunan, teknologi yang lebih dikenal dan canggih dari Desa Hanura sebagai media online yang lebih menarik perhatian masyarakat dapat menghambat berkembangnya Pelayanan Informasi Pembangunan Desa Hanura, hal tersebut dikhawatirkan media tersebut memberikan informasi yang salah seputar pembangunan desa khususnya pembangunan di desa Hanura. Peningkatan terhadap kualitas SDM aparatur Desa Hanura, seperti kegiatan rutin training kepada karyawan website Desa Hanura sehingga mampu mengatasi peningkatan akan kualitas website Desa Hanura.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih. dengan perkembangan teknologi dapat menyebabkan informasi yang beredar dapat disalahgunakan kepada sesuatu yang negatif jika tanpa disertai dengan peningkatan kualitas SDM aparatur Desa. Untuk itu, aparatur Desa Hanura harus mampu mengantisipasi dengan bersinergi dengan teknologi pelayanan informasi pembangunan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Adanya gangguan jaringan, karena dengan hanya menggunakan satu satelit di Kecamatan Teluk Pandan ini terjadi gangguan pada jaringan namun koneksi cenderung stabil. Membutuhkan koneksi inertnet yang mendukung baik dari segi kecepatan akses maupun server yang stabil dalam mengirim file data.

**KESIMPULAN**

Implementasi *website hanura.desa.id* cukup efektif sebagai media penyebaran informasi pembangunan desa, baik efek dalam kajian komunikasi massa (kognitif, afektif, dan konatif) maupun komunikasi interpersonal (keterbukaan, empati, dan sikap mendukung). Implementasi website Desa Hanura sebagai media Pelayanan informasi pembangunan sangat baik. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*). Strategi ini menandakan keadaan Desa yang kuat dan mampu untuk terus berkembang dengan mengambil kesempatan atau peluang yang ada untuk meraih pembangunan yang maksimal. Mempertahankan citra sebagai Desa pertama yang menjadi Desa percontohan dalam hal pelayanan informasi pembangunan melalui website Desa sehingga Meningkatkan kualitas pelayanan berbasis online. Memberikan respon yang cepat kepada masyarakat dan menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan instansi atau pemerintah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2015. *Profil PenggunaInternet di Indonesia 2014*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa InternetIndonesia.

Aprilia SN, Wijaya AF, Suryadi. 2014. Efektivitas website sebagai media e-government dalam meningkatkan pelayanan elektronik pemerintah daerah (studi pada website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang).

Bogdan, R. C. Dan Steven J. Taylor, 1992. Introduction to Qualitative Research Methotds: A Phenomenological Approach in the Social Sciences, alih bahasa Arief Furchan.

Bogdan, R., & Biklen, S. (1994). *Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos*. Porto editora.

Hartono, D. U., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*, *6*(1), 9-21.

Husna, S., & Abdullah, S. (2016). Kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi pada beberapa desa di kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *1*(1), 282-293.

Kriyantono, R. (2008). Teknik Praktis Riset. *Kencana Prenada Media Grup*.

Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, *103*.

Nomor, K. M. K. D. I. (57). Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga. *Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta*.

Nugroho, B. (2009). Membuat website sendiri dengan PHP-MySQL. *Jakarta: Media Kita*.

Silalahi, U. (2010). Metode Penelitian Sosial. PT Refika Aditama.

Sosiawan, E. A. (2015, June). Evaluasi implementasi e-government pada situs web pemerintah daerah di Indonesia: Prespektif content dan manajemen. In *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)* (Vol. 1, No. 5).